

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Ngoro adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Ngoro yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Ngoro.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

27. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Ngoro sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Ngoro pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Realisasi belanja pada Kecamatan Ngoro Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	42.155.500,00	41.080.500,00	9
	- Belanja Alat Tulis Kantor	23.887.000,00	23.887.000,00	
	-Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	6.366.500,00	6.366.500,00	
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.087.000,00	5.087.000,00	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.815.000,00	5.740.000,00	8
2	Belanja Bahan/Material	11.425.000,00	11.425.000,00	
	- Belanja Bahan / Bibit Tanaman	2.625.000,00	2.625.000,00	
	- Belanja Bahan untuk Peserta Pelatihan	8.800.000,00	8.800.000,00	
3	Belanja Jasa Kantor	108.858.960,00	97.821.367,00	8
	- Belanja Telepon	3.600.000,00	559.017,00	1
	- Belanja Air	0,00	0,00	
	- Belanja Listrik	30.400.000,00	22.653.390,00	7
	- Belanja Jasa Harian Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	
	- Belanja Jasa Publikasi/ Dokumentasi	3.750.000,00	3.750.000,00	
	- Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	
	- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	22.950.000,00	22.700.000,00	9
	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.400.000,00	3.400.000,00	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Umum	26.808.960,00	26.808.960,00	
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.475.000,00	33.773.500,00	9
	- Belanja Jasa Service	4.800.000,00	4.800.000,00	
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	27.675.000,00	27.666.000,00	9
	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	1.307.500,00	4
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.046.250,00	22.766.500,00	9
	- Belanja Cetak	13.550.000,00	13.275.000,00	9
	- Belanja Penggandaan	9.496.250,00	9.491.500,00	9
6	Belanja Makanan dan Minuman	81.470.000,00	81.470.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.540.000,00	55.540.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.080.000,00	1.080.000,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	24.850.000,00	24.850.000,00	
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	34.625.000,00	34.129.000,00	9
	Belanja Pakaian Panitia/Peserta Kegiatan	34.625.000,00	34.129.000,00	9
8	Belanja Perjalanan Dinas	86.700.000,00	85.593.250,00	9
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.800.000,00	79.800.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	5.793.250,00	8
9	Belanja Pemeliharaan	34.602.000,00	34.483.000,00	9
	- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	24.127.000,00	24.073.000,00	9
	- Belanja pemeliharaan perlengkapan			

	- Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	
11	Belanja Honorarium Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	
	- Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	
12	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.800.000,00	32.000.000,00	9
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	32.800.000,00	32.000.000,00	9
13	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.009.549.000,00	1.648.934.588,00	8
	- Gaji Pokok Pokok PNS/Uang Representasi	1.613.224.000,00	1.338.643.600,00	
	- Tunjangan Keluarga	167.349.000,00	133.174.050,00	
	- Tunjangan Jabatan	70.254.000,00	60.200.000,00	
	- Tunjangan Fungsional Umum	56.315.000,00	46.880.000,00	
	- Tunjangan Beras	99.444.000,00	69.450.780,00	
	- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	2.692.000,00	570.308,00	
	- Pembulatan Gaji	271.000,00	15.850,00	
14	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	769.720.000,00	600.025.510,00	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pertimbangan Obyektif Lainnya	187.120.000,00	140.504.000,00	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	582.600.000,00	459.521.510,00	
	TOTAL	3.335.826.710,00	2.788.152.215,00	8

Sumber Data Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Peran Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan N Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Target Renstra Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangka t Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81%	81%	NA	NA		78,93	78,30	

	Daerah Kabupaten/Kota									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang dapat tersusun	13 Dokumen	13 dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	9 Dokumen	
7.01.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	5 Dokumen	
7.01.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	4 Dokumen	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	86%	85%	84%	98%	90%	52%	
7.01.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	28 dokumen	n/a	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	28 Dokumen	20 Dokumen	
7.01.01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	30 laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	20 Laporan	

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	31 stel	31 Stel	31 Stel	31 Stel	100%	31 Stel	31 Stel	
7.01.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	31 stel	31 Stel	31 Stel	31 Stel	100%	31 Stel	31 Stel	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum sesuai kebutuhan	90%	100%	90%	90%	100%	90%	75%	
7.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	¾ Paket	
7.01.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
7.01.01.2.06.0 4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	

7.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3/4 Paket	
7.01.01.2.06.0 6	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	377 Bahan bacaan	n/a	NA	NA	NA	NA	NA	
7.01.01.2.06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan : Kertas, Tinta, Balpoint, Map dll	1 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	¾ Paket	
7.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	90%	100 %	100%	100%	100%	100%	75%	
7.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	

	Sumber Daya Air dan Listrik	daya air dan listrik								
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	1,5	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90%	100 %	89%	89%	100%	90%	75%	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Gedung	3 Gedung	

7.01.01.2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	$\frac{3}{4}$ Paket	
7.01.02	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	81%	N/a	NA	NA	NA			
7.01.02.2.04 .01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85%	81%						
7.01.02.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	310 Dokumen	310 Dokumen						
7.01.03		Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 Pelayanan	10 Dokumen				15 Pelayanan	0	

		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	310 Dokumen	310 Dokumen				385 Pelayanan	402 Pelayanan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81%				81%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	72 fasilitasi	13 fasilitasi	19 Desa	19 desa	100%	52 Fasilitasi		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitasi	3 fasilitasi	19 Desa	19 Desa	100%	10 Fasilitasi	7 Fasilitasi	

	Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24Fasilitasi	4 fasilitasi	19 Desa	19 desa	100%	8 Fasilitasi	5 Fasilitasi	
7.01.06.2.01. 11	Fasilitasi Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Fasilitasi	3 fasilitasi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%	10 fasilitasi	7 fasilitasi	
7.01.06.2.01. 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi	3 fasilitasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%	24 fasilitasi	19 fasilitasi	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capaian indikator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Ngoro

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM Kecamatan

Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C) sebagaimana berikut dibawah ini

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			NA	78,93	79,73	80,53	NA	78,30	79,73	80,53
2	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			79%	80%	81%	82%	79%		81%	82%
3	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti			79%	80%	81%	82%	79%		81%	82%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Ngoro diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitasi Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola dalam manajemen Kecamatan Ngoro

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Ngoro bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor Kecamatan Ngoro yang sistematis dan terencana sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Kantor Kecamatan Ngoro;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Ngoro namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian, peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun di tingkat desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Ngoro yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Ngoro untuk dapat meningkatkan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergi program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan/ Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngoro	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,73	3.816.143.773	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngoro	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,73	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	13 Dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	13 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	3.402.143.773	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngoro	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Laporan	3.397.143.773	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngoro	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Laporan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ngoro	Jumlah laporan Keuangan bulanan	30 Laporan	5.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ngoro	Jumlah laporan Keuangan bulanan	30 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	IP ASN Perangkat Daerah	81	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	IP ASN Perangkat Daerah	81	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Ngoro	Jumlah Bintek Peningkatan ASN yang dilaksanakan	2 Bintek	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Ngoro	Jumlah Bintek Peningkatan ASN yang dilaksanakan	2 Bintek	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Ngoro	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stel	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Ngoro	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 stel	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	185.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Ngoro	Jumlah jenis komponen instalasi	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Ngoro	Persentase realisasi anggaran Perangkat	1 paket	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik/penerangan bangunan kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ngoro	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ngoro	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Ngoro	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Ngoro	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ngoro	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ngoro	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ngoro	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	377 Bahan Bacaan	5.000.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ngoro	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	377 Bahan Bacaan	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Ngoro	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	45.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Ngoro	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngoro	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan	12 Bulan	35.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngoro	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan	12 Bulan	

			Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ngoro	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100 %	72.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ngoro	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ngoro	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ngoro	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ngoro	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 Orang	32.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ngoro	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 Orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ngoro	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90 %	117.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ngoro	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90 %	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kec. Ngoro	Jumlah pengadaan kendaraan dinasoperasional pendukung tugas sesuai kebutuhan	1 Kendaraan	24.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kec. Ngoro	Jumlah pengadaan kendaraan dinasoperasional pendukung tugas sesuai kebutuhan	1 Kendaraan	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Ngoro	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	3 kendaraan	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Ngoro	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	3 kendaraan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ngoro	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 gedung	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ngoro	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 gedung	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ngoro	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	15.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ngoro	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Ngoro	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Ngoro	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Ngoro	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1000 pelayan n	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Ngoro	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1000 pelayan n	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ngoro	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	10 pelayana n	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ngoro	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	10 pelayana n	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Ngoro	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	990 pelayana n	30.000.000		Kec. Ngoro	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	990 pelayana n	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ngoro	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	340.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ngoro	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ngoro	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	52 fasili-tasi	340.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ngoro	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	52 fasili-tasi	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Kec. Ngoro	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata	10 Fasilitasi	60.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Kec. Ngoro	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata	10 Fasilitasi	

	Desa		Pemerintahan Desa			Desa		Pemerintahan Desa		
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ngoro	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Fasilitas	60.000.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ngoro	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Fasilitas	
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngoro	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Fasilitas	80.000.000	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngoro	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Fasilitas	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ngoro	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitas	140.000.000	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ngoro	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitas	
JUMLAH					4.191.143.773	JUMLAH				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan yang berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi keagamaan. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Ngoro melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang berarti kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Ngoro secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, terdapat usulan dari pemangku kepentingan. Sehingga rincian pada tabel 2.6 (T-C 32) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Ngoro

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan -	Masjid Roudlotul Mu'minin, Desa Purwojati		1 Ekor sapi Kurban	Diselesaikan saat perayaan a

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka seluruh program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngoro ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dan Bertanggung Jawab.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jumlah terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah;
- 2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public		IKM Kecamatan	82	83	84	85	86
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	63	64	65	67
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	82	83	84	85	86

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngoro Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Ngoro yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Ngoro	79,73	4.191.143.773	APBD Kab		80,53	4.488.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Kec. Ngoro	7 dokumen	5.000.000	APBD Kab		7 dokumen	10.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Kec. Ngoro	6 dokumen	5.000.000	APBD Kab		6 dokumen	10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngoro	28 laporan	3.397.143.773	APBD Kab		28 laporan	3.568.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Keuangan bulanan	Kec. Ngoro	30 laporan	5.000.0000	APBD Kab		30 laporan	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Bintek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	Kec. Ngoro	2 Bintek	10.000.000	APBD Kab		2 Bintek	15.000.000

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec. Ngoro	30 stel	20.000.000	APBD Kab		30 stel	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Ngoro	1paket	10.000.000	APBD Kab		1paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Ngoro	1paket	50.000.000	APBD Kab		1paket	78.000.000
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ngoro	12 bulan	20.000.000	APBD Kab		12 bulan	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Kec. Ngoro	1paket	20.000.000	APBD Kab		1 paket	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Ngoro	377 bahan bacaan	5.000.000	APBD Kab		377 bahan bacaan	5.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll	Kec. Ngoro	1 Paket	45.000.000	APBD Kab		1 Paket	45.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngoro	12 bulan	35.000.000	APBD Kab		12 bulan	35.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan	Kec. Ngoro	12 bulan	40.000.000	APBD Kab		12 bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan selama 12 bulan	Kec. Ngoro	2 THL	32.000.000	APBD Kab		2 THL	32.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan	Kec. Ngoro	1 kendaraan	24.000.000	APBD Kab		2 kendaraan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya selama 12 bulan	Kec. Ngoro	3 kendaraan	38.000.000	APBD Kab		4 kendaraan	40.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah gedung kantor yang	Kec. Ngoro	3 gedung	40.000.000	APBD Kab		3 gedung	45.000.000

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpelihara dan berfungsi dengan baik							
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kec. Ngoro	1 paket	15.000.000	APBD Kab		1paket	15.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Ngoro	81%	35.000.000	APBD Kab		82%	45.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Ngoro	10 Pelayanan	5.00.000	APBD Kab		10 Pelayanan	10.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Ngoro	990 Pelayanan	30.000.000	APBD Kab		1100 Pelayanan	35.000.000
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Ngoro	81%	340.000.000	APBD Kab		82%	360.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ngoro	10 Fasilitasi	60.000.000	APBD Kab		10 Fasilitasi	65.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ngoro	8 Fasilitasi	60.000.000	APBD Kab		8 Fasilitasi	65.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngoro	10 Fasilitasi	80.000.000	APBD Kab		10 Fasilitasi	80.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ngoro	24Fasilitasi	140.000 000	APBD Kab		24 Fasilitasi	150.100.000
JUMLAH					4.191.143.773	JUMLAH			4.488.243.773

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan
Target Indikator Tujuan : 82

SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Target Indikator Sasaran : 61

SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
Indikator Sasaran : IKM Kecamatan
Target Indikator Sasaran : 82

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Target Indikator Program : 79,73

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
Target Indikator Program : 81 %

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
Target Indikator Program: 81 %

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan.	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat
Target indikator Kegiatan : 13 Dokumen	Target Indikator Kegiatan : 90%	Target Indikator Kegiatan :81	Target Indikator Kegiatan : 90%	Target Indikator Kegiatan : 100%	Target Indikator Kegiatan : 90%	Target Indikator Kegiatan : 1000 Pelayanan	Target Indikator Kegiatan : 52 Fasilitasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan sekilas eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan sasaran kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rencana Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisis rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 4.01.21 / 7.01.0.00.0.00.11
 NAMA SKPD : KECAMATAN NGORO

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	PRIORI TAS DAERA H	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					
					HASIL PROGRAM		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN	
					TOLOK UKUR	TARGE T	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	UNSUR KEWILAYAHAN									
I. 1	KECAMATAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			KEC. NGORO	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,73				
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dapat tersusun	13 Dokume n		

	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kec. Ngoro					Jumlah Dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Ngoro					Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	6 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. Ngoro					Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kec. Ngoro					Jumlah laporan keuangan bulanan	30 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						IP ASN Perangkat daerah	81		
	-Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi								Jumlah Bintek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 Binte
	-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lengkapnya			Kec. Ngoro					Jumlah penyediaan pakaian dinas	30 stel

									PNS serta perlengkapannya	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan administrasi umum PD sesuai kebutuhan	90%		
	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ngoro					Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Ngoro					Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. Ngoro					Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Ngoro					Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Ngoro					Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan	377 bahan bacaan

									Perundang-undangan yang disediakan	
	- Penyediaan Bahan/Material			Kec. Ngoro					Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ngoro					Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
	; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec. Ngoro					Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 THL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas			Kec. Ngoro					Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	1 kendaraan

									pendukung tugas sesuai kebutuhan	
	- Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			Kec. Ngoro					Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	3 Kendaraan
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. Ngoro					Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 Gedung
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Kec. Ngoro					Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 Paket
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85%				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1000 Pelayan an		

	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 Pelayan
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	990 Pelayan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	72 Fasilitasi		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Fasil

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Fasilitasi
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Fasilitasi
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa					Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi

BAB V

PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna mempermudah optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngoro, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Ngoro, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2008 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja

2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomi dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Ngoro diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kita tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bermembangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, September 202

Plt. Camat Ngoro



Drs. MUJIB, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196508091993121001

RENCANA KERJA
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN NGORO
TAHUN 2021